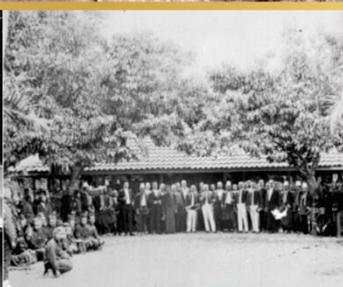
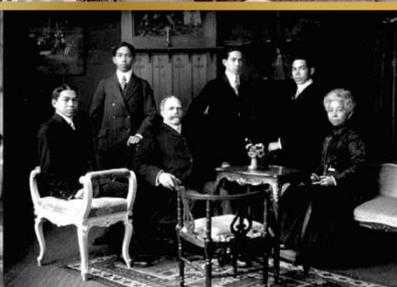
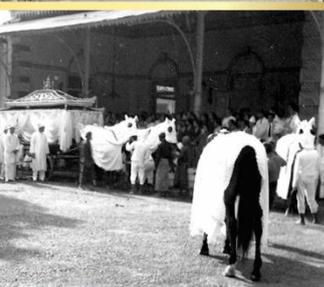


KARESIDENAN MADIUN 1896-1942

Kiprah Penguasa Belanda
dalam Modernisasi Administrasi
hingga Perubahan Sosial-Politik



Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.A.
(Guru Besar Sejarah UIN Jakarta)

KARESIDENAN MADIUN

1896-1942

Kiprah Penguasa Belanda dalam
Modernisasi Administrasi hingga Perubahan Sosial-Politik



MOCHAMMAD NGINWANUN LIKULLIL MAHAMID

www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

KARESIDENAN MADIUN 1896-1942

Kiprah Penguasa Belanda dalam
Modernisasi Administrasi hingga Perubahan Sosial-Politik

Copyright © 2022 By **MOCHAMMAD NGINWANUN LIKULLIL MAHAMID**

All right reserved

Penulis:

MOCHAMMAD NGINWANUN LIKULLIL MAHAMID

Desain Sampul:

Danillstr

Tata Letak:

Ainur Rochmah

Editor Naskah:

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Sumber Gambar:

<https://www.freepik.com/>

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan ke-1, Februari 2022

Cetakan ke-2, April 2022

Cetakan ke-3, Agustus 2022

Cetakan ke-4, Juni 2023

Cetakan ke-5, Juli 2024

14 x 21 cm, xviii + 313 halaman

ISBN 978-623-5679-84-6

Diterbitkan oleh:

PENERBIT KBM INDONESIA

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website: www.penerbitbukumurah.com

Email: karyabaktimakmur@gmail.com

Distributor: <http://toko.penerbitbukujogja.com>

Youtube: Penerbit KBM Sastrabook

Instagram: [@penerbit.sastrabook](https://www.instagram.com/penerbit.sastrabook) | [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

Anggota **IKAPI** (Ikatan Penerbit Indonesia)

Isi buku di luar tanggung jawab penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin dari Penerbit.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

KATA PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.A.
(Guru Besar Sejarah UIN Jakarta)

Buku ini awalnya adalah skripsi sarjana yang dipertahankan penulisnya pada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 1 Februari 2021 kemarin. Selaku pembimbing, saya mengikuti dengan baik proses lahirnya karya ini hingga menjadi buku yang kini di hadapan pembaca. Proses tersebut menunjukkan tidak hanya kemampuan akademik luar biasa seorang Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid untuk menggali dan menampilkan data-data sejarah dari subjek yang digarapnya, tetapi juga kecintaan yang tinggi terhadap kota kelahirannya, Madiun. Meskipun, perlu ditegaskan, kecintaan tersebut tidak membuat dirinya lalai dari prinsip-prinsip akademik, yang justru sangat dijunjung tinggi selama proses penelitian dan penulisan buku ini.

Sebagaimana bisa dilihat dari judulnya, buku ini menghadirkan pembahasan tentang satu periode penting dalam sejarah Kabupaten Madiun, ketika statusnya sebagai mancanegara di bawah naungan keraton Yogyakarta berakhir

selepas Perang Jawa (1825-1830). Sejak itu, tepatnya 31 Januari 1830, Madiun menjadi daerah dalam yurisdiksi Pemerintah Kolonial Belanda langsung, disebut Keresidenan Madiun. Akibatnya, Madiun dipimpin oleh seorang Residen berkebangsaan Belanda, menggantikan bupati dari kaum priyayi Jawa. Alih status ini jelas bermakna penting dalam sejarah Madiun, lebih dari hanya sekadar pergantian pucuk pimpinan. Dengan Residen sebagai kepala daerah, banyak program pembangunan berlangsung di Madiun, yang kemudian melahirkan perubahan sosial-budaya di mana pranata modern mulai diperkenalkan di daerah tersebut.

Meski tidak didukung data perbandingan dari daerah lain yang terus di bawah keraton Jawa, kajian buku ini menunjukkan bahwa perubahan status daerah tersebut telah memberi ruang lebar bagi proyek modernisasi kolonial untuk bisa berjalan demikian intensif di Madiun. Tiga aspek sengaja diambil sebagai bukti proyek modernisasi kolonial dan karenanya menjadi inti pembahasan buku ini, yakni struktur administrasi wilayah, pembangunan infrastruktur ekonomi dan pendidikan, dan perubahan sosial-budaya masyarakat. Semua itu tidak hanya membuat sistem birokrasi pemerintahan akrab dengan masyarakat yang makin terdidik dan maju secara ekonomi, tetapi juga mampu mendorong mereka lebih terbuka dengan pemikiran baru modern yang diperkenalkan Belanda sejalan dengan kebijakan modernisasi sejak awal abad ke-20. Di bagian akhir, buku ini menunjukkan kondisi keagamaan di mana suasana toleransi antar pemeluk agama yang beragama terjalin dengan baik, mewarnai pola kehidupan masyarakat.

Tentu saja, sejumlah pertanyaan masih mengemuka, yang terkait antara lain dengan pola kepemimpinan dan sistem budaya yang berlaku bahwa keresidenan dengan proyek modernisasi bisa meminimalisasi pengaruh budaya feodalisme yang berakar kuat di Jawa. Namun, dengan data di atas, satu

hal yang pasti adalah bahwa kolonisasi secara langsung telah berhasil menciptakan perubahan di berbagai bidang, yang mengarah pada kemajuan masyarakat. Birokrasi kolonial, melalui jabatan Residen dan selanjutnya Asisten Residen, tampak bekerja secara efektif sebagai mesin perubahan dalam sejarah perkembangan Madiun, di mana kebijakan pemerintah untuk modernisasi masyarakat relatif berhasil diimplementasikan.

Lebih dari itu, pengalaman Madiun ini juga memberi kita satu bukti konkret tentang perlunya mengubah persepsi sejarah masa kolonial yang terbebas dari perspektif sempit dan melulu menekankan sisi perlawanan, seraya mengabaikan fakta yang memperlihatkan penciptaan peradaban. Belajar dari kasus Madiun, tampak bahwa kerja-kerja peradaban bagi perkembangan masyarakat berlangsung, yang melibatkan baik mereka sebagai kaum pribumi yang dijajah. Di tengah perbedaan budaya dan keyakinan ideologi, keduanya tampak bisa bekerja sama dan bertemu dalam program pendidikan dan pembangunan ekonomi. Keduanya sama-sama berjasa dalam kegiatan-kegiatan yang berkontribusi bagi *civilizing the people* yang berlaku umum.

Dalam konteks spesifik, persepsi tentang pahlawan seharusnya juga berubah, meliputi aspek-aspek lain dari kehidupan yang selama ini terpinggirkan akibat penekanan yang terlampau dominan, bahkan menjadi salah satu kriteria utama dari pengakuan kepahlawanan, terhadap aspek perlawanan. Akibatnya, bukan saja aspek sivilisasi terabaikan dari persepsi tentang sejarah, tapi justru dinilai negatif semata-mata karena bekerja sama dengan pihak kolonial. Hal ini bukan tidak berimplikasi jauh bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul hingga kini terkait asal-usul, dan dominasi Barat, atas prinsip dan sistem sosial-

politik Indonesia, yang melahirkan sentimen enggan menerima secara terbuka, dalam banyak segi bisa dilacak pada persepsi sejarah yang terlalu mengglorifikasi sisi perlawanan. Karena itu, proses demokratisasi citra kepahlawanan perlu didorong lebih kuat.

Kehadiran buku ini dalam beberapa segi tertentu mengingatkan saya pada karya historiografi Barat awal era Renaissance, *History of the Florentine People* oleh Leonardo Bruni pada 1400-an. Di bawah semangat humanisme civic, Bruni memaknai keberhasilan Florence tidak pada pola penjelasan keagamaan ala Abad Pertengahan, tapi pada apa yang disebutnya sebagai *republican liberty*, yang melahirkan nilai-nilai kebajikan, semangat, ketekunan, dan kekuatan dalam masyarakat. Tentu tidak untuk membandingkan, apalagi menyamakan, apa yang disuguhkan Mochammad Nginwanun di buku ini sedikit banyak merupakan hasrat intelektualnya sebagai putra Madiun untuk memahami sejarah kota kelahirannya, sehingga atas dasar itu ia berharap bisa berkontribusi bagi perkembangan masyarakat Madiun. Hal krusial untuk ditekankan, ia melakukan itu melalui pemahaman sejarah dan budaya masyarakat, tidak dengan penjelasan keagamaan bergaya trans-nasional yang bisa jadi ia akrabi selama kuliah di perguruan tinggi Islam di Ciputat.

Karena itu, buku ini patut disambut gembira. Sehingga lahirnya karya-karya sejarah serupa juga perlu didorong. Dengan demikian, kiprah generasi muda untuk ikut serta dalam memajukan masyarakat di masa depan berbasis pada pemahaman sejarah dan budaya Indonesia yang komprehensif, termasuk pengalaman kalangan bangsa Indonesia yang bersedia belajar dan bekerja sama dengan kaum kolonial untuk alasan kemanusiaan dan peradaban.

Jakarta, 4 Januari 2022

UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS

Tiada kata yang paling indah selain mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan nikmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat seiring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini awalnya merupakan skripsi saya sebagai syarat kelulusan selama menimba ilmu di Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Kolonisasi, Modernisasi, dan Perubahan Struktur Sosial Politik di Karesidenan Madiun (1896-1907)”, yang berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 1 Februari 2021, dengan nilai rata-rata 93, dan meraih predikat *Cum Laude*. Skripsi tersebut selanjutnya saya kembangkan menjadi sebuah buku dengan temuan baru yang mutakhir, sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih lengkap dan eksplisit dari sebelumnya, begitu pun rentang waktunya diteruskan sampai akhir masa

pemerintahan Belanda tahun 1942, dan mengalami perubahan judul sebagaimana tertulis di awal.

Dalam penulisan skripsi kemarin, saya mendapatkan bimbingan langsung dari Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.A., Dosen sekaligus Guru Besar dalam bidang Sejarah UIN Jakarta. Keahlian beliau pada bidang sejarah lokal, khususnya era kolonial Belanda, sangat membantu saya dalam memecahkan masalah dan menggali sumber. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, yang mencurahkan segenap waktunya untuk memberi masukan, kritik, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi, sampai akhirnya terbit menjadi buku ini.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A., selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Drs. Saiful Umam, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Awalia Rahma, M.A., selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam sekaligus Dosen Penasihat Akademik saya, atas segala ilmu dan wejangan yang diberikan, serta kepada bapak dan ibu Dosen SPI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mengajar saya selama menempuh pendidikan S1 di UIN Jakarta.

Tak ketinggalan, saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora, yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan. Selain itu, kepada para staf Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, atas kemudahan yang diberikan dalam layanan peminjaman buku sebagai sarana untuk menunjang belajar, dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah.

Penyusunan buku ini membutuhkan waktu kurang lebih selama dua tahun. Terhitung sejak pengumpulan data untuk bahan penulisan skripsi, proses bimbingan dan revisi, ujian skripsi, sampai hasilnya dikembangkan menjadi sebuah buku. Pastinya tidak sedikit kesulitan yang saya hadapi, terlebih lagi di masa pandemi yang berkepanjangan, dan puncaknya ketika diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membuat saya terkadang harus menunda keinginan untuk melakukan kunjungan ke berbagai tempat, dalam rangka mencari sumber informasi. Namun berkat kesungguhan hati, perjuangan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga semua kendala tersebut dapat teratasi.

Pada akhirnya, kembali saya harus mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. Taufik, M.Si., selaku pelaksana tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, beserta para staf pelayanan arsip yang bersedia membantu saya dalam menelusuri arsip maupun literatur yang dibutuhkan untuk bahan penulisan, kemudian kepada Dr. Gatot Gunarso, selaku kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil 1 Madiun), dan Hj. Yuli Dwi Astuti, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ponorogo (pensiun pada akhir bulan Agustus 2020), selanjutnya digantikan oleh pelaksana tugas Kepala Sekolah, Setiantono, S.Pd., yang berkenan memberikan izin penelitian di lembaga yang mereka pimpin dalam upaya melengkapi hasil temuan, mengingat kedua bangunan itu merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.

Paling khusus, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, baik morel maupun finansial. Selain itu, keluarga besar SPI angkatan 2016, yang

telah menjadi teman baik saya selama duduk di bangku perkuliahan. Terakhir, ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada semua pihak yang belum disebutkan di atas, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat saya mengingat begitu banyak dukungan yang diberikan untuk kelancaran dalam pembuatan buku ini.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini, baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan lapang hati saya menerima berbagai kritik dan masukan supaya kelak di kemudian hari, saya dapat memperbaikinya.

Akhir kata, saya berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih kepada pecinta ilmu pengetahuan sejarah sebagai sumber penelitian tindak lanjut dan inventaris peninggalan sejarah Madiun, serta dapat menginspirasi para pegiat literasi agar senantiasa mau melestarikan sejarah lokal.

www.penerbitbukumurah.com

Madiun, 1 Februari 2022

Dilarang keras, mencetak hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....vii

Oleh: Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.A.
(Guru Besar Sejarah UIN Jakarta)

UCAPAN TERIMA KASIH PENULIS.....xi

DAFTAR ISIxv

BAB 1 PENDAHULUAN:
MADIUN DAN AWAL KEHADIRAN BELANDA 1

- A. Konflik Mataram dan Kolonial, Di Manakah Posisi Madiun? 2
- B. Menelusuri Kiprah Penguasa Belanda 4
- C. Tinjauan Historiografis 5
- D. Tujuan Penulisan 7
- E. Sumber-sumber Penulisan..... 8
- F. Struktur Buku 14

BAB 2 MADIUN DI TENGAH TRANSISI MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL 23

- A. Masyarakat dan Seni Khas Madiun..... 24
- B. Sistem Tanam Paksa yang Memberatkan..... 32
- C. Kasta dalam Pendidikan: Periode Hindia-Belanda 40
- D. Spiritualitas di Bawah Payung Kolonialisme 45

BAB 3	AWAL KOLONISASI MADIUN DI BAWAH RESIDEN	61
A.	Karesidenan: Sarana Kolonisasi Paling Efektif	62
B.	Perang Jawa (1825-1830) dan Arah Baru Kekuasaan	66
C.	Peralihan Sistem Birokrasi: Dari Tradisional Mataram ke Kolonial Belanda.....	68
D.	Kolonisasi dan Pembentukan Struktur Pemerintahan ..	75
BAB 4	MODERNISASI DAN PERUBAHAN ADMINISTRASI MADIUN DI BAWAH RESIDEN	89
A.	Modernisasi: Kedudukan Residen	90
B.	Pejabat Kolonial di Bawah Residen.....	95
C.	Residen Madiun Masa Perubahan Administrasi.....	101
1.	J.J. Donner (1896-1902).....	102
2.	W.F.L. Boissevain (1902-1907)	106
D.	Munculnya Gerakan Sosial-Politik	110
BAB 5	KEBIJAKAN RESIDEN MADIUN, 1896-1907.....	121
A.	Perubahan Ketatanegaraan dan Upaya Menata Ulang Wilayah Administrasi	122
B.	Pelaksanaan Politik Etis	126
1.	Pengairan Sawah dan Perkebunan.....	130
2.	Tunjangan Pendidikan	135
3.	Pemerataan Jumlah Penduduk	137
C.	Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Transportasi.....	140
D.	Pemberlakuan Undang-undang Desentralisasi.....	145
BAB 6	TERBENTUKNYA STRUKTUR ADMINISTRASI, 1905-1918.....	163
A.	Pola-pola Restrukturisasi	164
B.	Komitmen dalam Modernisasi Administrasi: Riwayat Lain Residen Donner dan Boissevain	169
C.	Ruang Lingkup Karesidenan Madiun dan Usulan Perubahan Cakupan Wilayah	171

1.	Kabupaten Madiun	172
2.	Kabupaten Magetan	173
3.	Kabupaten Ngawi	174
4.	Kabupaten Ponorogo	175
5.	Kabupaten Pacitan	177
D.	Hasil Pembagian Batas-batas Wilayah Administrasi	178
E.	Latar Belakang Berdirinya Kota Praja	187
F.	Restrukturisasi dan Penunjukan Pejabat Baru: Madiun di Bawah Residen yang Berubah.....	190
BAB 7	PERUBAHAN SOSIAL-POLITIK, 1919-1942	201
A.	Integritas dalam Pelayanan Publik: Pemerintah kepada Masyarakat	202
B.	Reformasi Birokrasi: Tantangan dalam Pembentukan Struktur Pemerintahan Baru	204
C.	Sistem Kerja Administrasi, Tata Ruang Wilayah, dan Pemilihan Kepala Daerah	208
D.	Ketersediaan Infrastruktur Publik.....	212
E.	Mobilisasi Ekonomi	218
F.	Membangun Citra Daerah dan Menarik Pendatang	222
G.	Kerukunan Antarumat Beragama dalam Perspektif Sosial-Budaya	229
1.	Islam sebagai Agama Mayoritas: Ulama, Pesantren, dan Kekuasaan	230
2.	Kristen dan Katolik: Prinsip Iman yang Berbeda ..	235
3.	Peninggalan dan Tradisi Hindu-Budha: Akulturasi dalam Konteks Kearifan Lokal.....	237
4.	Pasang Surut Pengaruh Etnis Tionghoa dan Agama Konghucu.....	241
H.	Substansi dan Keberlanjutan	247
	DAFTAR PUSTAKA	267
	GLOSARIUM	297

INDEKS	301
TENTANG PENULIS	311



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

BAB 1

PENDAHULUAN: MADIUN DAN AWAL KEHADIRAN BELANDA

Madiun merupakan sebuah daerah kecil yang tumbuh di bagian timur Pulau Jawa, luas wilayahnya tidak sebanding dengan Surabaya, Malang, maupun Banyuwangi yang sekarang, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui lebih jauh perihal daerah tersebut.¹

Apabila ditanya sejarahnya, kebanyakan yang paling diingat tentang Madiun adalah pemberontakan PKI 1948,² sejarah tersebut sangat akrab di telinga masyarakat sebab telah diajarkan di sekolah sejak dini. Lain halnya dengan sejarah Madiun di masa kolonial, yang pada masa itu Madiun pernah menjadi bagian dari kekuasaan Belanda, bahkan terpilih sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Karesidenan Madiun, yang membawahi kabupaten-kabupaten sekitarnya.³ Maka dalam buku ini mengangkat pembahasan tentang sejarah Karesidenan Madiun.

A. Konflik Mataram dan Kolonial, Di Manakah Posisi Madiun?

Memasuki awal abad ke-19, Dinasti Mataram melewati tahun-tahun genting dalam upaya mempertahankan wilayah kedaulatannya, sebagai konsekuensi adanya ekspansi wilayah besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830).⁴ Mereka berusaha memperluas tanah jajahan di tanah Jawa, dan selanjutnya di seluruh Hindia Belanda, yang kemudian dikenal Pax Neerlandica.⁵

Perkembangan di atas tentu menciptakan masalah stabilitas politik dan pemerintahan yang harus dihadapi Mataram untuk kedua kalinya, setelah berakhirnya fase Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang menyebabkan wilayah Mataram terpecah menjadi dua kekuasaan, yaitu: Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.⁶ Salah satu masalah serius dan berimplikasi signifikan adalah lepasnya wilayah Mancanegara Timur dari pangkuan Dinasti Mataram.⁷

Mancanegara Timur merupakan bagian penting dalam struktur birokrasi pemerintahan tradisional Mataram, terdiri atas 20 kabupaten yang masing-masing dikepalai satu Bupati, dan setiap Bupati wajib melaporkan hasil kegiatan yang menyangkut jalannya pemerintahan kepada Sultan Yogyakarta maupun Sunan Surakarta yang bertindak sebagai Raja Jawa.⁸ Akan tetapi, setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Mancanegara Timur, terdapat 17 kabupaten yang jatuh ke tangan administrasi pemerintah Belanda, antara lain: Madiun, Magetan, Maospati, Gorang Gareng, Ngawi, Jogorogo, Tungal, Purwodadi, Caruban, Ponorogo, Polorejo, Sumoroto, Pedanten, Polangan, Pacitan, Pangul, dan Lorrok. Semua daerah tersebut diintegrasikan ke dalam sistem birokrasi pemerintahan baru di

bawah penguasa kolonial Belanda yang diberi nama Karesidenan Madiun.⁹

Transformasi pemerintahan ini menjadi satu poin pembahasan penting untuk dikaji lebih lanjut. Selain terkait polemik perebutan tahta dan wilayah kekuasaan, hal tersebut sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan Raja Jawa atas Mancanegara Timur. Sejak itu, Bupati tidak lagi bertanggungjawab kepada Raja Jawa melainkan kepada Gubernur Jenderal melalui Residen, dan segala bentuk tindakan maupun kebijakan yang terkait urusan pemerintahan harus memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal.¹⁰

Masa kependudukan Belanda di Karesidenan Madiun terhitung sejak dikeluarkannya resolusi Gubernur Jenderal tanggal 31 Agustus 1830.¹¹ Melihat potensi alam melimpah yang dimiliki Madiun dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, pemerintah Belanda melakukan berbagai upaya sistematis untuk menjadikan tanah jajahan baru tersebut sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, mulai dari penguasaan tanah, mengeksploitasi hasil perkebunan, dan penarikan pajak.¹² Sementara itu, di sisi kehidupan sosial, masyarakat Madiun yang masih menjunjung tinggi budaya Mataraman, dikenal memiliki tata krama yang baik dan berbudi luhur, justru dimanfaatkan oleh bangsa kolonial Belanda sebagai tenaga kerja di ladang perkebunan mereka secara paksa.¹³

Dalam kerangka itu, Pemerintah Kolonial Belanda langsung bergerak cepat dalam usaha menciptakan struktur pemerintahan yang efisien dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip administrasi modern, yakni menetapkan Madiun sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibukota Karesidenan Madiun dan menunjuk L. Launij (1830-1838) sebagai Residen Madiun pertama. Selanjutnya, ke-16 kabupaten lainnya dipimpin oleh Asisten Residen yang bertanggungjawab kepada

Residen Madiun. Seorang Kontrolir (Pengawas) juga diangkat dan bertugas sebagai penyambung komunikasi antara pihak kolonial Belanda dengan para Bupati.¹⁴

B. Menelusuri Kiprah Penguasa Belanda

Seiring bergantinya kekuasaan, pembaharuan dalam struktur pemerintahan terus dilakukan oleh pemerintah Belanda demi meningkatkan kemajuan dalam sistem birokrasi, seperti dikeluarkannya Lembaran Negara (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië*) nomor 57 tahun 1876, tentang tugas-tugas Residen yang mengatur jalannya pemerintahan di tingkat karesidenan. Oleh karena itu, Residen Madiun memiliki otoritas dalam mengambil setiap kebijakan di pemerintahan Karesidenan Madiun, salah satunya adalah melakukan perubahan struktur administrasi dan kekuasaan, sebagai cara sistematis dalam menciptakan efisiensi birokrasi dan kemajuan pemerintahan.¹⁵

Hal penting berikutnya yang perlu dikaji adalah pengaruh dari kebijakan administrasi pemerintahan kolonial tahun 1986, yang dirancang dalam semangat modernisasi, terhadap perubahan-perubahan di bidang sosial-politik.¹⁶ Melihat hal itu, tugas seorang Residen tentu tidak mudah, sehingga perlu dukungan dari semua pihak terkait tata kelola pemerintahan dan pengembangan wilayah, di antaranya: Asisten Residen dan Kontrolir (Pengawas) yang membantu urusan pemerintahan.¹⁷

Dengan semua hal di atas, pengalaman sejarah Madiun memperlihatkan satu corak perkembangan di mana kolonisasi menjadi satu variabel menentukan dalam perubahan sosial-politik. Kebijakan modernisasi dari Politik Etis tampak sangat efektif bekerja dalam rangka kemajuan masyarakat, kemudian muncul kebijakan lainnya yang sejalan dengan progres

perkembangan dan perluasan wilayah jajahan, yakni adanya gagasan baru sebagai upaya untuk mengelola daerah-daerah administrasi yang disebut Decentralisatie Wet 1903.¹⁸

Kajian buku ini diarahkan untuk melengkapi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sebatas menjelaskan tentang tahapan-tahapan perubahan struktur pemerintahan di Karesidenan Madiun dari tahun 1901 hingga 1905,¹⁹ akan tetapi belum spesifik menjelaskan bagaimana upaya Residen Madiun melakukan restrukturisasi administrasi pemerintahan, bagaimana pola-pola pengaplikasiannya, dan juga titik temu antara perubahan struktur administrasi dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial-politik, termasuk pada bidang agama.

C. Tinjauan Historiografis

Kajian buku ini sebagian besar membahas tentang sejarah Madiun, akan tetapi ketika Belanda mengambil alih sistem kekuasaan, terdapat kebijakan pemerintahan di Madiun yang senantiasa terintegrasi dengan daerah lainnya pada tingkat karesidenan, yaitu: Magetan, Ngawi, Ponorego, dan Pacitan.²⁰

Fokus buku ini mengulas tentang mekanisme penataan ulang wilayah administrasi yang berpengaruh terhadap kondisi sosial politik masyarakat, berdasarkan hasil kebijakan Residen Madiun, sebagai pejabat kolonial Belanda yang memerintah pada tahun 1896 hingga 1907, di antaranya: Residen J.J. Donner (1896-1902) dan Residen W.F.L. Boissevain (1902-1907). Semua hal itu kemudian berpengaruh terhadap perubahan sosial-politik masyarakat Karesidenan Madiun, termasuk bidang keagamaan, sampai berakhirnya masa kekuasaan Hindia Belanda tahun 1942.

Penulisan sejarah tentang Madiun di masa kolonial bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya telah ada tema serupa mengenai studi tokoh, pembentukan wilayah administrasi,

serta konflik sosial-politik yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, sebagaimana literatur-literatur berikut ini sebagai acuan penulis dalam penulisan buku ini.

Buku pertama yang secara khusus membahas tentang politik dan pemerintahan di Madiun adalah buku yang ditulis oleh Sri Margana dan tim dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Buku tersebut berjudul *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, terbit edisi revisi pada tahun 2018. Secara singkat buku ini mengulas tentang sejarah Madiun dari masa kerajaan hingga kolonial Belanda, terdapat pula pembahasan mengenai reorganisasi pemerintahan di wilayah Karesidenan Madiun tahun 1901-1905,²¹ akan tetapi belum ada penjelasan lebih spesifik mengenai keterlibatan Residen Madiun dalam pembentukan administrasi pemerintahan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial-politik masyarakat, hal itu yang kemudian menjadi upaya penulis untuk melengkapi hasil penelitian tersebut, terutama pada bagian pola-pola restrukturisasi.

Buku kedua lebih kompleks membahas tentang Karesidenan Madiun adalah dengan judul *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, diluncurkan pada tanggal 21 November 2018 dalam acara seminar bertajuk pemajuan budaya, bertempat di *ballroom* salah satu hotel di Kota Madiun. Buku tersebut awalnya merupakan Disertasi dari Sejarawan keturunan Tionghoa bernama Ong Hok Ham yang selesai ditulis pada tahun 1975 untuk Jurusan Sejarah di Universitas Yale, New Haven, Amerika Serikat, dengan judul *"The Residency of Madiun: Pryayi and Peasant in Nineteenth Century."* Sebagian dari isi buku tersebut membahas tentang awal terbentuknya

Karesidenan Madiun dan perkembangannya, serta menjelaskan kedudukan pejabat kolonial, bupati, priyayi, dan petani di Karesidenan Madiun,²² hanya saja buku ini mengulas pada periode kolonisasi, kemudian penulis ingin melanjutkannya ke tahap modernisasi, di antaranya pembahasan mengenai lahirnya Politik Etis dan pemberlakuan Undang-undang Desentralisasi di pemerintahan Karesidenan Madiun.

Karya ilmiah lainnya yang mengulas tentang kebijakan administrasi pemerintahan di Madiun, berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Suwignyo dan Baha'uddin pada tahun 2018, dengan judul "Politik Pemerintahan dan Kebijakan atas Ruang dalam Penetapan Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017", dalam *Jurnal Sejarah Indonesia*. Artikel tersebut mengawali penjelasan mengenai pembentukan wilayah Karesidenan Madiun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pasca berakhirnya Perang Diponegoro 1830,²³ kemudian spesifik membahas tentang pemindahan ibukota Kabupaten Madiun ke daerah Mejayan (sekarang Caruban) pada tahun 2010, sebagai upaya memberi ruang gerak terhadap aktivitas pemerintahan Madiun, serta untuk kemajuan suatu daerah.²⁴ Dari situlah, penulis ingin mempelajari pola tersebut agar nantinya dapat diterapkan dalam cakupan yang lebih luas, yakni seluruh daerah di Karesidenan Madiun.

D. Tujuan Penulisan

Pemilihan Karesidenan Madiun sebagai lingkup spasial dalam penulisan buku ini, sebab adanya kedekatan emosional penulis yang sejak kecil dibesarkan di daerah tersebut, khususnya Kabupaten Madiun, selain itu masih minimnya penulisan sejarah lokal yang mengangkat tema daerah asal di

kalangan mahasiswa yang semestinya memiliki tanggung jawab besar dalam melestarikan sejarah tempat tinggal mereka supaya tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, buku ini ditulis tidak untuk merevisi kajian penelitian sebelumnya yang pernah membahas sejarah pemerintahan dan pembentukan struktur wilayah Karesidenan Madiun, melainkan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan temuan-temuan baru sebagai usaha penulis dalam merekonstruksi sejarah Madiun supaya memperoleh hasil yang lebih utuh dan aktual.

Berkaitan dengan konteks keislaman dalam buku ini, terletak pada perjuangan kaum priyayi, ulama, dan petani di Karesidenan Madiun yang mayoritas beragama Islam, dan menentang segala bentuk kekejaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Atas sikap itulah, Residen Madiun kemudian melakukan upaya modernisasi pada struktur sosial dan politik untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah kolonial dengan pemerintah pribumi yang bersitegang, kemudian dari perubahan administrasi menjadi pondasi awal dalam melakukan pembangunan sebagai modal dasar dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan.

Hasil yang diharapkan dari buku ini adalah memberikan sumbangsih kepada pecinta ilmu pengetahuan sejarah sebagai sumber penelitian tindak lanjut dan inventaris peninggalan sejarah Madiun, mengingat kenangan di masa lampau sebagai pusat pemerintahan, Madiun tentunya memiliki sejarah yang unik di masa kolonial, maka amat salah jika ingatan masyarakat kini hanya terpatri pada Pemberontakan PKI 1948.

E. Sumber-sumber Penulisan

Kekuasaan Hindia Belanda memiliki periodisasi yang cukup panjang dalam menjalankan pemerintahan di

Karesidenan Madiun, supaya pembahasan dalam buku ini lebih terarah, maka dibuatlah batasan terkait temporal atau waktu peristiwa sejarah itu terjadi.

Sesuai dengan judul, lingkup temporal buku ini adalah dari tahun 1896 hingga 1907, yakni sejak dilantiknya Residen Donner tahun 1896 sebagai Residen Madiun pertama yang mengambil kebijakan melakukan restrukturisasi atau perubahan struktur administrasi, kemudian dilakukan pembentukan batas-batas wilayah administrasi dan pemerintahan oleh Residen Boissevain pada tanggal 27 Januari 1905. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaruh perubahan administrasi terhadap kondisi sosial politik di Karesidenan Madiun sampai akhir masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1942.

Dalam hal ini, langkah penting yang perlu penulis jelaskan adalah proses mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan.²⁵ Adapun sumber yang berhasil ditemukan, terdiri atas: arsip kolonial, naskah Jawa, dan sumber sekunder.

Arsip Kolonial, Artefak (Bangunan), dan Foto

Penulis melakukan penelusuran sumber primer berupa arsip kolonial di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), pencarian pada katalog K.87b: *Algemene Secretarie* Seri Grote Bundel Besluit 1891-1942 Jilid I, dengan judul arsip *Algemeene Secretarie* nomor 1271 tahun 1902-1905, terdapat tiga berkas yang memuat data berkaitan dengan restrukturisasi wilayah administrasi di Karesidenan Madiun, antara lain: surat pengantar proposal perubahan administrasi, penjelasan Residen Madiun Boissevain terkait usulan perubahan cakupan wilayah administrasi di Karesidenan Madiun yang tertuang dalam isi proposal sebanyak 13 halaman, dan *Staat*

Aantoonende De Administratieve Indeeing Der Residentie Madioen, yakni data yang berisi pembagian batas-batas wilayah administrasi di Karesidenan Madiun, terdiri atas: kabupaten, kecamatan, dan desa yang telah disetujui.

Sumber berikutnya penulis dapatkan di Ruang Perpustakaan ANRI, rak khusus Lembaran Negara Hindia Belanda, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 329 tahun 1903, berisi Undang-undang Desentralisasi yang mendorong Residen Madiun Boissevain mengambil kebijakan untuk menata ulang struktur pemerintahan dan wilayah administrasi sesuai pola-pola yang berlaku, kemudian *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 605 tahun 1905, keputusan mengenai penetapan wilayah administrasi di pemerintahan Karesidenan Madiun, dan hasil keputusan tersebut melahirkan perubahan pada struktur pemerintahan dengan ditunjuknya pejabat kolonial baru, tertuang dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 26 dan 137 tahun 1907.

Penulis mencari arsip tambahan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), lantai 14: layanan koleksi buku langka, terdapat kumpulan *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* pada rentang waktu 1896-1907, yang penulis gunakan untuk menggali informasi seputar nama-nama pejabat kolonial Belanda yang pernah memerintah di Karesidenan Madiun.

Pencarian arsip secara online juga dilakukan pada situs www.delpher.nl, menu buku berbahasa Belanda (*Boeken basiscollectie*), terdapat *Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indië over het jaar 1896*, laporan tahunan Hindia Belanda yang menjelaskan pembangunan infrastruktur di pemerintahan Hindia Belanda khususnya Karesidenan Madiun, berikutnya *Het Inlandsche gemeentewezen op Java en Madoera 1901*, tentang jumlah

penduduk yang ditentukan untuk dapat membentuk wilayah administrasi baru menurut skema pemerintahan kota madya di Jawa dan Madura, kemudian buku yang ditulis oleh Residen Donner sebagai pelaku sejarah, berjudul *Een Tienjarige Strijd* (Perjuangan Sepuluh Tahun), isinya menceritakan tentang pengalaman dan prestasinya selama menjabat di pemerintahan Karesidenan Madiun tahun 1896-1902. Sedangkan pada menu artikel koran Belanda (*Krantenartikelen*), penulis menemukan berita tentang perubahan wilayah administrasi di Karesidenan Madiun yang dimuat dalam *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, edisi *10-e Jaargang*, ditulis oleh G. Wybrands, pada tanggal 20 Desember 1905.

Melengkapi sumber tertulis, penulis melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di Karesidenan Madiun, adapun bangunan yang masih ada di masa sekarang, yaitu: rumah dinas Residen Madiun (sekarang Kantor Bakorwil 1 Madiun) dan rumah dinas kedua Residen Madiun di Ponorogo (sekarang SMP Negeri 1 Ponorogo). Untuk membuktikan bahwa bangunan tersebut benar-benar pernah digunakan oleh pelaku sejarah pada zamannya, maka penulis kembali menemukan arsip berupa foto rumah dinas Residen Madiun pada link: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:829702> (*Woning Te Madioen*, 1908)²⁶ dan foto rumah dinas kedua Residen Madiun yang berada di Ponorogo pada link: <https://hdl.handle.net/20.500.11840/226079> (*Residents-woning Te Ponorogo in de Resident Madioen*. Elite Atelier H.G. Rimestadt, 1900).

Selain yang disebutkan di atas, masih ada arsip kolonial yang tersedia di Perpustakaan Leiden maupun Arsip Nasional Den Haag di Belanda, antara lain: *Algemeen Verslag der Residentie Madioen* dan *Memorie van Overgave*, berisi laporan

umum serah terima jabatan atau pertanggungjawaban dari Residen Madiun J.J. Donner (1896-1902) dan W.F.L. Boissevain (1902-1907), yang menjadi subjek utama dalam penulisan buku ini, hanya saja sumber-sumber tersebut luput dari pengamatan penulis, dikarenakan keterbatasan biaya untuk melakukan penelitian secara langsung ke Belanda, sekalipun penulis telah menemukan judul arsip tersebut melalui pencarian online, sehingga terdapat ruang kosong untuk penelitian setelah ini.

Naskah Jawa (Babad)

Di samping menggunakan arsip kolonial sebagai sumber utama dalam penulisan sejarah, penulis mengkomparasikannya dengan temuan naskah Jawa, yakni Babad Ponorogo, karangan Purwowidjojo tahun 1984, yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ponorogo. Adapun yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan buku ini, *Babad Ponorogo, Jilid III (R. Brotodiningrat)*, membahas tentang riwayat Bupati Madiun Brotodiningrat yang terlibat perseteruan dengan Residen Donner di masa Politik Etis, disebabkan oleh sikap Residen yang merugikan rakyat pribumi, salah satunya kebijakan pengairan (irigasi) yang hanya ditujukan untuk kepentingan para investor asing yang menanamkan modal di Madiun.²⁷ Selain itu, *Babad Ponorogo, Jilid VII (Ponorogo Zaman Walanda)*, berisi pembagian Ponorogo menjadi beberapa daerah bagian, dan pembahasan lainnya tentang pembangunan moda transportasi kereta api Madiun-Ponorogo dari tahun 1897 hingga 1907, sebagai langkah modernisasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda.²⁸

Temuan berikutnya berupa naskah digital *Babad Patjitan, Jilid VI: Kawontenanipoen Nagari Patjitan Sabibaripoen Perang*

Dipanaganaran, ditulis oleh R. Gandawardaja tahun 1935, yang terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, lantai 8: layanan audiovisual. Naskah tersebut mengulas tentang kondisi Pacitan setelah dikuasai oleh pemerintah Belanda dan menjadi bagian wilayah Karesidenan Madiun, kemudian mengalami perubahan administrasi seiring diberlakukannya kebijakan modernisasi.²⁹

Sumber Sekunder

Untuk memperkuat serta melengkapi hasil temuan sebelumnya, penulis mengumpulkan sumber sekunder berupa buku maupun dokumen dengan tema penelitian dan temporal yang sama, namun dengan spasial berbeda. Sumber yang penulis dapatkan di Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, antara lain: *Asal-usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh, Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI, Menelusuri Jejak Masa Lalu: Sekilas Sejarah Kabupaten Madiun, Nusantara: Sejarah Indonesia*, “Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun: Dari Mejayan Menuju Kejayaan Masa Depan,” *Sejarah Kabupaten Madiun*, dan *Sejarah Panjang Mataram: Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta*.

Sumber lainnya hasil penelusuran di Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di antaranya: *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia, Politik Islam Hindia Belanda, Sejarah Indonesia Abad XIX - Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, dan *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*.

Penelusuran selanjutnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu: *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Dutch*

Colonialism and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts 1596-1950, Indonesia dalam Arus Sejarah, Jilid 5: Masa Pergerakan Kebangsaan, Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942, Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Perjuangan Pangeran Diponegoro: Antara Nasionalisme, Spiritualitas, dan Budaya, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, dan Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang.

F. Struktur Buku

Penelusuran dan penulisan sejarah merupakan hal pokok yang digunakan sebagai instrumen utama untuk menganalisis serta mendokumentasikan peristiwa sejarah yang terjadi,³⁰ seperti halnya Residen Madiun selama menjalankan tugas sebagai kepala karesidenan, terutama ketika mengambil kebijakan terkait penataan ulang wilayah administrasi, sehingga terdapat kecamatan-kecamatan dan desa-desa pada setiap kabupaten dalam lingkup Karesidenan Madiun.

Kebijakan Residen Madiun di atas tentu bukan tugas yang mudah, mengingat kedudukannya sebagai pejabat kolonial yang mana dalam struktur organisasi Pemerintah Hindia Belanda bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Jenderal sebagai kepala pemerintah pusat,³¹ selain itu Residen Madiun juga ikut membawahi Asisten Residen dan Kontrolir (Pengawas) yang membantu urusan pemerintahan, dengan demikian Residen Madiun perlu melakukan pertimbangan serta koordinasi kepada semua pihak terkait pengembangan wilayah.³²

Berawal dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Residen Madiun, maka terbentuklah wilayah administrasi di tiap-tiap kabupaten, sehingga mempunyai pengaruh terhadap perubahan struktur sosial politik masyarakat Karesidenan Madiun, termasuk bidang agama. Buku ini terdiri atas 7 bab, dengan susunan sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan tentang gambaran umum penulisan buku yang mengangkat tema sejarah Madiun di masa kolonial Belanda, kemudian relasi antara Madiun dan Mataram, kiprah penguasa Belanda atau yang bertindak sebagai pejabat kolonial di Madiun, selain itu tinjauan atas penelitian sejarah sebelumnya yang relevan, sehingga penulis dapat menemukan hal baru dan signifikansinya dengan didukung sumber-sumber sejarah untuk menjawab permasalahan pada studi penelitian tersebut, baru setelahnya penulis menguraikan secara singkat struktur penulisan buku ini untuk menuntun pembaca ke arah temuan.

Lanjut bab 2, membahas bagaimana kondisi Madiun dan beberapa kabupaten sekitarnya pada awal masa kependudukan Belanda, lebih tepatnya sebelum lahir kebijakan modernisasi, yang meliputi: kondisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, sebagai bukti adanya sistem pemerintahan kolonial yang berjalan di Karesidenan Madiun. Penulis juga memperkenalkan budaya Mataraman yang masih terjaga oleh masyarakat Madiun, meskipun berada dalam pengaruh kolonial Belanda, sebagai salah satu bukti bahwa Madiun mempunyai ciri khas sendiri dalam perkembangannya di masa kolonial.

Bab 3 lebih spesifik membahas tentang transformasi pemerintahan dari Mataram ke Belanda, termasuk Madiun ada di dalamnya, diawali penjelasan mengapa sistem administrasi karesidenan yang dipilih sebagai sarana kolonisasi di Madiun,

sebab-sebab terjadinya Perang Jawa (1825-1830) yang membuat wilayah Mancanegara Timur jatuh ke tangan Belanda, selanjutnya pergantian sistem birokrasi dan pembentukan struktur administrasi dengan menempatkan Residen sebagai kepala pemerintahan di tingkat karesidenan.

Bab 4 mulai masuk ke tahap modernisasi, seiring dikeluarkannya *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 57 tahun 1876, yang mengatur tugas-tugas pokok pejabat kolonial, sehingga terjadi sinergisitas antara Residen, Asisten Residen, dan Kontrolir (Pengawas), dengan pemerintah pusat Hindia Belanda, yang menyebabkan lahirnya kebijakan perubahan administrasi. Selain itu, dalam bab ini mencantumkan nama-nama pejabat kolonial yang pernah memerintah di Karesidenan Madiun, dan juga riwayat hidup singkat dari Residen Madiun yang mempunyai peranan penting dalam mengambil kebijakan modernisasi administrasi, sejauh yang penulis ketahui dari berbagai sumber dan arsip kolonial.

Bab 5 berisi penjelasan mengenai kebijakan penting yang dilakukan Residen Madiun dalam meningkatkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih maju, caranya dengan membuat struktur administrasi baru yang melibatkan semua pihak termasuk rakyat pribumi, maka kebijakan yang diambil orientasinya pada pembentukan administrasi, di antaranya: perubahan ketatanegaraan dan upaya menata ulang wilayah administrasi, pelaksanaan Politik Etis, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi, serta pemberlakuan Undang-undang Desentralisasi. Walaupun secara substansi kebijakan-kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat pribumi, melainkan adanya kepentingan khusus yang menuntut Residen Madiun mengeluarkan kebijakan tersebut.

Bab 6 membahas tentang implikasi dari kebijakan yang diambil oleh Residen Madiun pada bab sebelumnya, terkait pembentukan struktur administrasi pada periode pertama di Karesidenan Madiun, mulai dari usulan-usulan perubahan cakupan wilayah, bagaimana pola-polanya, serta hasil pembagian batas-batas wilayah administrasi di setiap kabupaten, antara lain: Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Di akhir bab, terdapat ulasan singkat mengenai pemekaran daerah dan penunjukan pejabat baru di Madiun sebagai implikasi dari adanya perubahan administrasi.

Bab 7 sebagai bagian terakhir dalam pembahasan buku ini, menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan administrasi terhadap kondisi sosial-politik masyarakat Karesidenan Madiun, termasuk pada bidang agama, karena perubahan yang diinginkan bukan sekadar memisahkan satu daerah yang sudah terbentuk untuk kemudian menjadi wilayah administrasi baru, melainkan upaya dari Residen Madiun dalam menciptakan efisiensi birokrasi, dan kemajuan di setiap daerah.

www.penerbitbukumurah.com

Catatan Akhir

- 1) Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017" (Surabaya: Badan Pusat Statistik, 2021), akses 11 Maret 2021, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1823/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>. Menurut data tersebut, Madiun kini menempati urutan ke-24 dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur berdasarkan luas wilayah, yakni 1.037,58 km², peringkat 1 dan 2 ditempati oleh Kabupaten Banyuwangi dan Malang, dengan luas wilayah masing-masing 5.782,40 km² dan 3.530,65 km². Selanjutnya untuk kota madya,

Surabaya menduduki peringkat pertama sebagai ibukota sekaligus kota terbesar di Jawa Timur, dengan luas wilayah 350,54 km², sedangkan Kota Madiun sendiri hanya memiliki luas wilayah 33,92 km².

- 2) Harry A. Poeze, *Madiun 1948: PKI Bergerak*, terjemahan oleh Hersri Setiawan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 305.
- 3) Pemerintah Daerah Tingkat II Madiun, *Sejarah Kabupaten Madiun*, (Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun, 1980), hlm. 181–182.
- 4) Ardian Kresna, *Sejarah Panjang Mataram: Menengok Berdirinya Kesultanan Surakarta*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 307.
- 5) Peter Boomgaard, “Smallpox, Vaccination, and the Pax Neerlandica Indonesia, 1550-1930,” *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* 159, no. 4, (Oktober 2013), hlm. 590–591.
- 6) Soedjipto Abimanyu, *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram: Seluk-Beluk Berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), hlm. 139. Lihat pula: Artikel jurnal “Babad Giyanti: Sumber Sejarah dan Karya Agung Sastra Jawa,” yang ditulis oleh M.C. Ricklefs tahun 2014, hlm. 22, Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Mangkubumi (Sri Sultan Hamengkubuwono I) sebagai utusan Yogyakarta dan Pakubuwana III selaku perwakilan dari Surakarta, pada tanggal 13 Februari 1755, bertempat di Desa Giyanti atau sebelah tenggara Surakarta.
- 7) Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, (Jakarta: KPG), hlm. 45.

- 8) Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, (Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018), hlm. 120–121.
- 9) Agus Suwignyo dan Baha'uddin, "Politik Pemerintahan dan Kebijakan Atas Ruang dalam Penetapan Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017," *Jurnal Sejarah Indonesia* 1, no. 1, (Mei 2018), hlm. 84–85.
- 10) Sir Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, Volume I, (London: Gilbert dan Rivington, 1817), hlm. 308–309.
- 11) Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, 124. Resolusi tentang pembentukan Karesidenan Madiun yang terdapat 17 dari 20 kabupaten bekas wilayah Mancanegara Timur, sebagaimana yang tertera pada penjelasan sebelumnya. Adapun tiga kabupaten yang tidak diikutsertakan, antara lain: Nguneng, Arjowinungan, dan Tandingan.
- 12) M.P. Sediono Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 18–20.
- 13) Pemerintah Kabupaten Madiun, *Menelusuri Jejak Masa Lalu: Sekilas Sejarah Kabupaten Madiun*, (Madiun: Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan PUSKAKOM Surabaya, 2005), hlm. 60, 79–80.
- 14) Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, hlm. 96.

- 15) Tugas dan Wewenang Residen, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 57, 1876, hlm. 1–2.
- 16) *Algemeene Secretarie* nomor 1271, 27 Januari 1905, Seri Grote Bundel Besluit 1891-1942 Jilid I, K.87b. Penjelasan Residen Madiun terkait usulan penataan ulang wilayah administrasi.
- 17) Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, hlm. 96–97.
- 18) Undang-undang Desentralisasi, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 329, 1903, hlm. 1–3.
- 19) Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, hlm. 199.
- 20) Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, 146.
- 21) Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik dan Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, 214–217.
- 22) Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, 73, 195 & 247.
- 23) Agus Suwignyo dan Baha'uddin, "Politik Pemerintahan dan Kebijakan atas Ruang dalam Penetapan Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017," 84–86.
- 24) Agus Suwignyo dan Baha'uddin, "Politik Pemerintahan dan Kebijakan atas Ruang dalam Penetapan Ibu Kota Baru Kabupaten Madiun: Menemukan Posisi Caruban 1830-2017," 81.

- 25) M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 219–230. Alur metode sejarah dalam penulisan buku ini, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan).
- 26) Meskipun foto yang penulis dapatkan dicetak pada tahun 1908, akan tetapi ada bukti lain yang bisa menguatkan bahwa rumah dinas tersebut sudah dibangun sebelum tahun itu, seperti kisah perseteruan antara Residen Madiun Donner dengan Bupati Madiun Brotodiningrat tahun 1902, yang nantinya dibahas pada bab 4 mengenai riwayat hidup Residen Madiun.
- 27) Purwowidjojo, *Babad Ponorogo, Jilid III: R. Brotodiningrat*, (Ponorogo: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, 1984), 12–13.
- 28) Purwowidjojo, *Babad Ponorogo, Jilid VII: Ponorogo Zaman Walanda*, (Ponorogo: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, 1984), 41 & 51.
- 29) R. Gandawardaja, *Babad Patjitan, Jilid VI: Kawontenanipeon Nagari Patjitan Sabibaripoen Perang Dipanagaran*, 1213, (Batavia-Centrum: Bale Poestaka, 1935), 34–35.
- 30) Agus Mulyana dan Darmiasti, *Historiografi Indonesia: Dari Magis-Religius hingga Strukturis*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8–9, 141.
- 31) Tugas dan Wewenang Residen, *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 57, 1876, 1–2.
- 32) Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*, 96–97.

BAB 2

MADIUN DI TENGAH TRANSISI MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN KOLONIAL

Kelahiran dan perkembangan Karesidenan Madiun tentu mempunyai keunikan sendiri dibandingkan daerah administrasi lainnya, seperti: Banyumas, Kediri, Kedu, Pekalongan, Rembang, dan Semarang, yang sama-sama pernah menjadi bagian dari pemerintahan tradisional Mataram, yakni budaya Mataraman yang masih terjaga oleh masyarakat Madiun, meskipun berada di bawah Pemerintah Kolonial Belanda.¹

Pembahasan dalam bab 2 ini, mengulas bagaimana Madiun menuju kondisi di bawah sistem pemerintahan kolonial Belanda, yang meliputi kondisi sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, sebagai bukti adanya sistem pemerintahan yang berjalan di daerah tersebut.²

BAB 3

AWAL KOLONISASI MADIUN DI BAWAH RESIDEN

Kedatangan Pemerintah Kolonial Belanda di Madiun pada awal abad ke-19, menandai dimulainya babak baru yang mana suatu negara dapat melakukan legitimasi untuk menguasai rakyat, dan mendapatkan keuntungan dari sumber alam yang tersedia. Pada studi kasus Madiun ini, pemerintah Belanda menginginkan adanya proses pengembangan dan perluasan wilayah, serta pergantian sistem birokrasi yang menempatkan Residen sebagai kepala pemerintahan.¹

Detail pembahasan pada bab 3 ini, menjelaskan mengenai sistem birokrasi pemerintahan di Madiun, mulai dari mekanisme kolonisasi, masa peralihan kekuasaan, sampai terbentuknya daerah administrasi di bawah naungan Residen, beserta struktur pemerintahannya, yang terdiri atas: Residen, Asisten Residen, dan Kontrolir (Pengawas).²

BAB 4

MODERNISASI DAN PERUBAHAN ADMINISTRASI MADIUN DI BAWAH RESIDEN

Sebelum masuk ke tahap modernisasi, jumlah kabupaten di Karesidenan Madiun terus berkurang pada rentang waktu tahun 1832 hingga 1876, hal ini sebagai langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam upaya menghemat anggaran dana.¹ Masalah serius lainnya yang tengah dihadapi adalah ketimpangan wewenang di daerah-daerah tertentu, terutama dalam hal penguasaan tanah dan penarikan pajak, sehingga perlu adanya aturan tambahan atau mekanisme yang mengatur tugas-tugas pokok pejabat kolonial, khususnya Residen sebagai kepala pemerintahan di tingkat karesidenan.²

Secara spesifik bab 4 ini menjelaskan tentang sinergisitas antara Residen dengan pemerintah pusat Hindia Belanda, termasuk bawahannya dalam struktur pemerintahan karesidenan, sampai lahirnya kebijakan perubahan administrasi, kemudian mengulas sedikit tentang riwayat hidup

BAB 5

KEBIJAKAN RESIDEN MADIUN, 1896-1907

Penjelasan mengenai tugas dan wewenang Residen oleh Gubernur Jenderal yang diatur dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* nomor 57 tahun 1876, merupakan landasan untuk menstabilkan birokrasi pemerintahan kolonial Belanda menjelang akhir abad ke-19, khususnya di Karesidenan Madiun,¹ akan tetapi kebutuhan fungsional di dalam lembaga pemerintahan tidak selalu sama seiring pergantian kepengurusan, oleh karena itu pembaharuan pada struktur pemerintahan perlu dilakukan demi meningkatkan sistem birokrasi kolonial Belanda ke arah yang lebih maju, meliputi: tata kelola pemerintahan, pengalihan kekuasaan, dan penyelenggaraan administrasi baru.²

Selanjutnya terdapat elemen penting yang mendukung jalannya birokrasi, antara lain: kantor pemerintahan, jalan raya, dan sarana transportasi yang memadai, di samping munculnya sistem baru dari pemerintah pusat Hindia Belanda yang berlaku di tanah jajahan, yaitu: Politik Etis dan Undang-undang Desentralisasi. Semua itu menjadi tolok ukur Residen Madiun,

BAB 6

TERBENTUKNYA STRUKTUR ADMINISTRASI, 1905-1918

Karesidenan Madiun dalam perkembangannya telah mengalami berbagai dinamika politik dan kekuasaan sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari Sistem Tanam Paksa, Ekonomi Liberal, dan Politik Etis, selain itu adanya pengurangan jumlah kabupaten di Karesidenan Madiun untuk menghemat pengeluaran Pemerintah Hindia Belanda, kemudian lanjut pada era di mana Residen Madiun diberi kewenangan dalam mengatur segala kebutuhan fungsional di pemerintahannya, serta mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan wilayah Karesidenan Madiun.¹

Bab 6 ini membahas tentang implikasi dari setiap kebijakan yang dilakukan Residen Madiun J.J. Donner (1896-1902) dan W.L.F. Boissevain (1902-1907), di lain sisi juga menjelaskan terkait pola-pola restrukturisasi, usulan-usulan perubahan dan hasil pembagian batas-batas wilayah di setiap

BAB 7

PERUBAHAN SOSIAL-POLITIK, 1919-1942

Pelaksanaan restrukturisasi atau penataan ulang wilayah administrasi bukan sekadar memisahkan satu daerah yang sudah terbentuk, yang kemudian berdiri sendiri menjadi wilayah administrasi baru, namun adanya upaya dari Residen Madiun yang pernah menjabat sebelumnya, yaitu: J.J. Donner dan W.F.L. Boissevain, dalam menciptakan efisiensi birokrasi dan kemajuan di setiap daerah, dan hal itu bukan hanya bersifat sementara melainkan untuk jangka panjang.

Pada bab 7 ini mendiskusikan tentang perubahan-perubahan pada bidang sosial-politik masyarakat Karesidenan Madiun, sebagai hasil dari terselenggaranya modernisasi administrasi, di antaranya: peningkatan pelayanan pejabat pemerintah kepada masyarakat, sistem kerja administrasi yang banyak mengadopsi Pemerintah Hindia Belanda, tersedianya pabrik-pabrik gula dan ladang perkebunan tebu sebagai mata pencaharian penduduk, moda transportasi kereta api dan pasar-pasar yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat yang

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Kolonial (Dokumen, Majalah, dan Surat Kabar)

Algemeene Secretarie nomor 1271, 1902-1905. Seri Grote Bundel Besluit 1891-1942 Jilid I, K.87b. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Algemeene Secretarie nomor 4025, 5 April 1905. Seri Grote Bundel Besluit 1891-1942 Jilid II, K.87c. Arsip Nasional Republik Indonesia.

A.M. Joekes, dkk. *“Jubileum-Verlag: Uitgegeven Ter Gelegenheid van het 25-Jarig Bestaan der Vereeniging Kartinifonds te ‘s-Gravenhage.”* Batavia-Centrum, 27 Juni 1938. www.delpher.nl.

Beng, Kwee Kek. “Sin Po, Wekelijkse Editie: Saptoe 5 April 1941.” *N.V. Handel Mij dan Drukkerij Sin Po Batavia*, 1941. <http://hdl.handle.net/1959.1/1403736>.

Berg, L.W.C. Van Den. *“Het Inlandsche Gemeentewezen Op Java En Madoera.”* s’Gravenhage: Jemaintiendral, 1901. www.delpher.nl.

GLOSARIUM

- Afdeling* : Wilayah administrasi setingkat dengan kabupaten
- Algemeene Secretarie* : Sekretariat Negara. Lembaran yang berisi surat-surat, nota, proposal, atau dokumen tertulis lainnya yang dibuat oleh pejabat Hindia Belanda
- Assistent-Resident* : Kepala daerah di tingkat kabupaten
- Aspirant-Controleur* : Lurah. Kepala daerah di tingkat desa
- Binnenlandsch-Bestuur* : Aparatur pemerintahan Hindia Belanda
- Burgemeester* : Jabatan setingkat Walikota pada masa kolonial Belanda
- Carik* : Staf pemerintahan tingkat desa pada bidang administrasi/surat-menysurat
- Commiezen* : Komisaris. Staf ahli atau pejabat kolonial yang mempunyai posisi penting di pemerintahan
- Controleur* : Camat. Kepala daerah di tingkat kecamatan

INDEKS

A

A. Mulder, 96
A. Pecqueur, 192
A. Ruterling, 94
A. Sangster, 98
A. Schultz, 99
A.H.W. Baron de Kock, 94
A.J.H. Eijken, 95
A.M. Oudemans, 94
A.M. van der Elst, 98
Afdeling, 124, 125, 299
Agraria, 37, 55, 280
Arjosari, 126, 165, 177, 178, 185
Arjowinangun, 71, 184
Asisten Residen, xiii, 3, 4, 14, 16,
61, 75, 92, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 102, 106, 107, 110, 112,
123, 125, 141, 170, 188, 191,
192, 193, 198, 207
Aspiran-Kontrolir, 124, 125, 164,
167, 203

B

B.H.H. Ravenswaaij, 94, 111

B.J. van den Berg, 99
Babadan, 167, 172, 176, 180, 184,
216
Badegan, 176, 184, 214
Bagi, 124, 126, 135, 166, 169, 180,
181
Bakorwil, xvii, 11, 91, 113, 114,
209, 213, 249, 251, 282, 294,
297
Bandar, 178, 185
Bangunrejo, 182, 183
Barongsai, 247
Batik, 30, 53, 285, 296
Bendo, 174, 182
Binnenlandsch Bestuur, 9, 10,
20, 74, 76, 77, 80, 81, 95, 97,
98, 99, 100, 102, 114, 115, 116,
117, 125, 151, 160, 192, 194,
195, 197, 198, 199, 200, 252,
269, 272, 299, 302
Birokrasi, viii, xiii, 51, 68, 69, 74,
81, 83, 84, 85, 115, 117, 118,
194, 199, 205, 206, 207, 275,
276, 277, 278, 292
Boissevain, 5, 9, 10, 12, 94, 101,
105, 106, 107, 108, 109, 116,
118, 122, 142, 143, 144, 145,

TENTANG PENULIS



Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, lahir di Madiun tanggal 9 November 1997. Pernah mengenyam pendidikan di MIN Klagenserut (lulus 2010), MTsN Bibrik (lulus 2013), MAN 2 Madiun (lulus 2016), dan baru saja menyelesaikan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai lulusan terbaik Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, pada wisuda sarjana ke-120 tahun 2021. Kini ia sedang melanjutkan studi S2 di universitas yang sama, pada Program Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam, tahun ajaran 2021/2022.

Bekecimpung dalam dunia kepenulisan telah ia lakukan sejak SMA, waktu itu ia pernah menerbitkan buku novel dengan judul *Ketika Sang Surya Menghampiriku* (2016), selanjutnya ia mengembangkan keterampilan menulisnya ketika duduk di bangku perkuliahan, dan kembali menerbitkan buku ilmiah berjudul *Kesenian Wayang dan Gemelan: Akulturasi Budaya dalam Proses Islamisasi di Indonesia* (2018). Beberapa buku antologi juga pernah ia terbitkan bersama kawan lainnya sesama penulis, antara lain: *Jendela Rabbani* (2017), *Kuberi Judul: Sebuah Titik* (2018), *Perjalanan Air Mata* (2019), *A Journey of Thousand Miles: Antologi Kisah Perjuangan Meraih*

Mimpi ke Luar Negeri Melalui Program Internasional (2020), dan Secarik Asrar Tuhan dalam Juang (2021).

Berbekal semangat menulis, ia pernah diundang sebagai presenter dalam acara *International Youth Leader Conference*, yang bertempat di Gedung Dewan Budiman, Fakultas Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 17-19 Maret 2019. Pada tahun yang sama, ia juga terpilih sebagai relawan internasional dalam agenda *Friendship From Indonesia to share Love Happiness from Indonesia to South Korea*, berlokasi di Busan dan Seoul, Korea Selatan, September 2019. Terakhir, sebagai pembicara makalah pada kegiatan *Asia Africa International Model United Nations Conference*, via zoom meeting, 15-18 Januari 2021.

Prestasi yang pernah ia torehkan pada bidang kepenulisan, yakni sebagai juara pertama lomba menulis esai se-Tangerang Selatan pada tahun 2017 dan 2018, selain itu aktif menjadi kontributor penulisan buku di berbagai lembaga maupun komunitas menulis. Ia pernah mendapatkan penghargaan SAA (*Student Achievement Award*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, secara berturut-turut pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, sebagai mahasiswa berprestasi non-akademik, dalam kategori kejuaraan/lomba, karya inovatif, presenter/pembicara, dan relawan kemanusiaan.

Bagi yang ingin menyampaikan kritik dan saran, maupun pertanyaan kepada penulis dapat disampaikan melalui email nginwanun@gmail.com.